

UPAYA MENGHIDUPKAN SEKTOR RIIL

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Disampaikan pada Seminar Sehari
Kerjasama Harian Bisnis Indonesia dengan Sigma Conference
Jakarta, 22 Oktober 1998

I. Pendahuluan

Sudah lebih dari satu tahun yang lalu, tepatnya sejak Juli 1997 bangsa Indonesia dilanda krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi bahkan berlanjut menjadi krisis kepercayaan. Kondisi krisis dengan berbagai dampak negatifnya tersebut, sama sekali berbeda nuansa dengan masa-masa sebelumnya yang lebih menjanjikan bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pada tahun 1998, ekonomi kita diperkirakan mengalami kontraksi antara 10 dan 15 persen. Atas dasar realisasi laju inflasi selama 9 bulan pertama tahun 1998 yang mencapai lebih dari 75 persen, maka diperkirakan laju inflasi pada tahun 1998 akan melampaui 80 persen. Jumlah pengangguran meningkat sebagai akibat banyaknya perusahaan mengurangi produksi dan bahkan menghentikan kegiatannya. Banyak anak usia sekolah terancam putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu lagi membiayai. Interaksi antara meningkatnya jumlah pengangguran sebagai akibat kontraksi ekonomi di satu pihak dan melambungnya laju inflasi di lain pihak, maka jumlah penduduk miskin yang sudah mulai berkurang jumlahnya menjadi bertambah banyak lagi. Dalam hubungan ini Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 79,4 juta atau lebih kurang 39 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Upaya untuk mengatasi masalah mendesak dan memulihkan kembali kondisi perekonomian kita tidaklah mudah. Kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang menjerat perekonomian kita. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menghentikan keadaan menjadi lebih buruk lagi, yakni dengan menciptakan stabilitas, baik sosial, politik maupun ekonomi. Hanya dengan demikian kita dapat menggerakkan kembali roda-roda perekonomian sehingga ekonomi kita dapat pulih kembali.

Kunci utama upaya untuk keluar dari jerat krisis ini adalah pemulihan kepercayaan pelaku ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Pertama-tama kita harus mengupayakan kembalinya kepercayaan para pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makin nyata tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri, kita berharap kepercayaan pelaku ekonomi luar negeri akan mengikutinya.

Pulihnya kepercayaan para pelaku ini, dapat tercipta apabila mereka merasa aman dan tenteram dalam melakukan aktivitasnya. Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, nilai tukar Rupiah akan makin stabil dan secara bertahap makin membaik dan akhirnya mencapai tingkat yang wajar. Dengan stabilnya nilai tukar pada tingkat yang wajar, tekanan terhadap inflasi akan mereda. Harga barang-barang kebutuhan pokok, serta subsidi yang harus disediakan, akan juga menurun secara bertahap. Menurunnya inflasi akan diikuti dengan menurunnya tingkat bunga. Seiring dengan mulai berhasilnya pembenahan di sektor perbankan, makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa aman dalam

menjalankan usahanya, dan adanya reformasi struktural di sektor riil, maka penurunan tingkat bunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Langkah-langkah yang sedang ditempuh dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah: **Pertama**, menciptakan kembali rasa aman pada semua pelaku ekonomi dengan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. **Kedua**, menggalang konsesus politik sebagai landasan bagi terciptanya suasana sosial dan politik dalam negeri yang stabil. **Ketiga**, tindakan untuk memperbaiki *governance*, baik di sektor pemerintah (*public governance*) maupun di sektor dunia usaha (*corporate governance*).

II. Kebijakan di Bidang Ekonomi dan Moneter

Langkah-langkah khusus di bidang ekonomi dan moneter, diprioritaskan kepada 4 (empat) hal, yaitu: **pertama**, mengamankan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau; **kedua**, mengendalikan laju inflasi sehingga tidak menjadi hiperinflasi; **ketiga**, memfungsikan kembali peranan dunia perbankan dalam mendukung perekonomian, termasuk pemulihan kembali tersedianya pembiayaan bagi perdagangan (*trade financing*); dan **keempat**, meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga utama perekonomian, khususnya dalam mengendalikan krisis dan keadaan darurat.

Langkah-langkah di bidang ekonomi dan moneter tersebut mencakup lima kebijakan penting, yaitu: a) kebijakan fiskal dan moneter; b) reformasi di sektor keuangan/perbankan; c) restrukturisasi hutang; d) reformasi struktural di sektor riil; dan e) mendorong ekspor. Kebijakan fiskal terutama difokuskan untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap dampak krisis, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

a. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam situasi permintaan agregate yang tertekan dengan masih akan ditempuhnya kebijakan moneter yang ketat, maka upaya meningkatkan permintaan masyarakat dalam kaitan untuk menghidupkan sektor riil adalah melalui kebijaksanaan fiskal yang ekspansif. Untuk mencegah dampak inflatoir dari kebijaksanaan fiskal ekspansif tersebut pemerintah tetap akan menggunakan kebijakan anggaran yang berimbang, dengan dana luar negeri sebagai sumber untuk membiayai defisit anggaran. Selain itu juga, pengeluaran pembangunan akan lebih diarahkan kepada proyek-proyek yang cepat menghasilkan dan yang membawa efek penciptaan tenaga kerja yang luas. Untuk sementara proyek-proyek pembangunan yang berdampak jangka waktu panjang akan dikurangi.

b. Reformasi Sektor Perbankan

Reformasi di sektor keuangan/perbankan yang sedang dilakukan tujuan utamanya adalah agar secepat mungkin sistem perbankan pulih kembali dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendukung utama kegiatan ekonomi. Tegasnya mencakup, antara lain, dikembangkannya mekanisme untuk membantu perbankan yang relatif sehat dapat segera mengucurkan kembali kreditnya dan menjadi inti bagi operasi perbankan di masa datang serta menjamin tersedianya kredit modal kerja bagi para eksportir.

c. Restrukturisasi Hutang Perbankan dan Perusahaan Swasta

Restrukturisasi hutang perbankan dan perusahaan swasta merupakan prioritas penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Dalam rangka mempercepat proses restrukturisasi

sektor swasta dan menyelesaikan masalah hutang-hutangnya, telah diluncurkan skema INDRA dan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Selanjutnya melalui Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative*) telah dibentuk kerangka kerja yang meletakkan prinsip-prinsip untuk bernegosiasi antara kreditur dan debitur dalam rangka penyelesaian dan restrukturisasi perusahaan di luar sidang pengadilan. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk kreditur domestik dan asing secara tidak diskriminatif. Upaya restrukturisasi dan penyelesaian hutang perusahaan swasta ini sangat penting untuk menghidupkan kembali kegiatan sektor riil.

Perlu ditegaskan di sini bahwa demi suksesnya restrukturisasi hutang perusahaan swasta perlu dilengkapi dengan dilaksanakannya reorganisasi perusahaan swasta, tercakup di dalamnya kemungkinan untuk terjadinya kepailitan, likuidasi, merger, dan akuisisi. Dalam hubungan ini perlu diidentifikasi berbagai hambatan di bidang hukum yang akan menghambat terlaksananya proses reorganisasi perusahaan swasta.

d. Reformasi Struktural Sektor Riil

Reformasi struktural di sektor riil ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan sekaligus menghilangkan berbagai praktek monopoli dan aturan-aturan yang menghambat serta merugikan perekonomian secara keseluruhan. Demikian pula upaya deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan dalam dan luar negeri serta bidang investasi, akan terus dilanjutkan. Kita juga mengupayakan privatisasi BUMN. Tambahan pula berbagai landasan hukum ekonomi sedang terus kita kembangkan, antara lain, meliputi: perubahan Undang-Undang Perbankan, penyiapan Undang-Undang Persaingan Sehat, dan Undang-Undang Bank Sentral.

e. Promosi Ekspor

Dalam kondisi permintaan domestik yang menurun, maka wahana untuk menghidupkan kembali kegiatan sektor riil adalah melalui promosi ekspor. Tambahan pula dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tinggi dewasa ini, Indonesia sebenarnya makin memiliki daya saing dalam barang ekspor yang padat karya dan padat kekayaan alam. Namun peningkatan ekspor dewasa ini dihadapkan kepada beberapa kendala, yakni keengganan pihak luar negeri membeli barang Indonesia, ketiadaan bahan baku, serta hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ekspor, seperti misalnya operasi pelabuhan, kecepatan kerja, bea dan cukai, dan administrasi perpajakan.

Keengganan pembeli luar negeri untuk merencanakan pembelian terhadap produk industri manufaktur Indonesia, antara lain, disebabkan oleh kekhawatiran mereka atas ketidakmampuan para pengusaha Indonesia untuk dapat memenuhi pesanan tersebut tepat waktu. Hal ini erat kaitannya dengan permasalahan sosial politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian dalam upaya untuk mendorong ekspor, upaya mewujudkan stabilitas sosial politik sangatlah penting.

Kesepakatan Frankfurt akan berdampak positif bagi penyediaan bahan baku impor yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan produksi yang berorientasi ekspor. Selain itu mulai bulan Juli 1998 Bank Indonesia mengadakan program jaminan *pre-shipment* kepada eksportir yang sudah memperoleh L/C dari luar negeri demi untuk memperlancar impor bahan baku yang diperlukan dan untuk pembiayaan ekspor *pre-shipment*. Sementara itu untuk memperoleh modal kerja kebijaksanaan yang ditetapkan ada kaitannya dengan restrukturisasi dunia perbankan, dunia usaha, dan pinjaman dunia usaha terhadap perbankan dalam negeri.

III. Penutup

Berbagai upaya yang saya sebutkan di atas memang tidak semuanya dapat segera nampak hasilnya, oleh karena luas dan dalamnya krisis ekonomi yang sedang kita alami dewasa ini. Namun, arahnya sudah jelas dan kita mempunyai harapan bahwa hanya dengan kerja keras kita akan mampu mengatasi masalah tersebut, betapapun beratnya. Kepercayaan akan kemampuan diri kita untuk mengatasi masalah ini amatlah penting.

Walaupun masih terlalu dini untuk menilai hasil dari upaya pemulihan ekonomi, beberapa perkembangan terakhir memberikan rasa optimis bahwa langkah-langkah yang kita tempuh sudah berada pada arah yang benar. Beberapa perkembangan yang membesarkan hati dapat dikemukakan di sini, antara lain: a) Rupiah telah menguat sejak pertengahan Juli dan sekarang ini telah mencapai di bawah Rp. 9.000,- per dolar Amerika; dan b) laju inflasi dalam dua bulan terakhir menunjukkan tanda-tanda menurun, yaitu: setelah meningkat cukup tajam pada bulan Juli sebesar 8,56 persen, pada bulan Agustus telah menurun menjadi sebesar 6,30 persen, dan kemudian menurun lagi menjadi sebesar 3,75 persen pada bulan September. Pada bulan-bulan mendatang, laju inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan makin menguatnya nilai Rupiah dan berbagai upaya yang sedang dilaksanakan dalam mengatasi situasi pangan.

Kecenderungan membaiknya kedua indikator harga tersebut, dan menurunnya suku bunga pada negara-negara yang bermata-uang kuat, telah mendorong suku bunga domestik turun dalam satu bulan terakhir. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka waktu 1 (satu) bulan turun dari 70,4 persen pada akhir Agustus 1998 menjadi 59,2 persen pada pertengahan Oktober 1998. Dengan penurunan suku bunga ini kegiatan transaksi di pasar modal juga mulai bangkit kembali, yang tercermin dari kenaikan indeks harga saham gabungan akhir-akhir ini.

Tanda-tanda pulihnya kondisi moneter tersebut masih terlampau awal untuk memastikan terjadinya perbaikan ekonomi. Dengan situasi ekonomi regional dan global yang cenderung memasuki resesi pada tahun 1999 mendatang, seperti yang diperkirakan IMF dalam laporannya pada awal Oktober 1998, maka beban pemulihan ekonomi Indonesia makin berat. Namun demikian kita harus memiliki sikap optimis dalam upaya keluar dari krisis ekonomi.

Dengan langkah-langkah yang telah dan akan terus dilaksanakan serta melihat hasil-hasil yang telah dicapai sejauh ini, saya yakin bahwa kita telah melaksanakan kebijaksanaan yang tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi. Namun kita juga harus realistis. Upaya stabilisasi ekonomi, termasuk penguatan Rupiah, terlebih lagi upaya restrukturisasi perbankan, perusahaan swasta dan reformasi di sektor riil, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapai hasilnya. Faktor dominan lainnya yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan pemulihan ekonomi adalah suasana sosial dan politik dalam negeri yang stabil.